

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL



Disampaikan Oleh
Sujarwo, M.Pd

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2008

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL

Oleh: Sujarwo, M.Pd

PENDAHULUAN

Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu prioritas nasional dengan target menurunkan jumlah orang dewasa buta huruf sebesar 50% pada tahun 2009. Tujuan utama pendidikan keaksaraan adalah membelajarkan warga belajar agar dapat memanfaatkan kemampuan dasar baca, tulis, dan hitung (calistung) dan kemampuan fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari.

Agar pendidikan keaksaraan tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan perlu adanya tenaga tutor keaksaraan yang memiliki kompetensi di setiap kelompok belajar. Mengingat saat ini para tutor keaksaraan merupakan tenaga yang belum sepenuhnya mampu membelajarkan warga belajar KF dengan karakteristik khusus dan berbeda dengan anak-anak, maka para tutor perlu diberikan dukungan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka tidak memungkinkan untuk melatih semua tutor pada setiap kelompok belajar, maka dari itu diperlukan suatu acuan praktis yang dapat memandu tutor untuk melaksanakan pembelajaran keaksaraan tanpa harus dilatih secara terpusat

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, dan pelaksanaan pembelajaran keaksaraan sesuai dengan prinsip pembelajaran keaksaraan fungsional, maka diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar pendidikan keaksaraan fungsional, yang diawali dari sejarah singkat pemberantasan buta huruf sampai pada evaluasi, yang menggambarkan proses progra pendidikan keaksaraan secara lengkap dan komprehensif.

SEJARAH SINGKAT BUTA HURUF

Tahun 1945

Pemberantasan buta aksara sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Lebih dari 90 persen penduduk Indonesia ketika itu buta huruf. Dikenal dengan Pemberantasan Buta Huruf atau

Kursus ABC. Ditangani Pemerintah melalui *Bagian Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan*

Tahun 1949

Bagian Pendidikan Masyarakat berubah menjadi *Jawatan Pendidikan Masyarakat*.

Tahun 1951

Disusun rencana *Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf* dengan harapan buta huruf akan selesai dalam jangka waktu 10 tahun.

Tahun 1960

Masih terdapat sekitar 40 persen orang dewasa yang buta huruf. (Dit. Dikmas, PBH di Indonesia, 1972). Dikeluarkan *Komando Presiden* untuk menuntaskan buta huruf sampai tahun 1964, dan pada 31 Desember 1964 penduduk Indonesia usia 13 s.d. 45 tahun (kecuali di Irian Barat) dinyatakan telah bebas buta huruf. Namun karena tidak ada pembinaan lanjutan dan langkanya bahan bacaan, di samping banyak para aksarawan baru menjadi buta huruf kembali, juga ditambah anak usia SD (usia 6-12 tahun) yang tidak sekolah, dan putus SD kelas I, II, III yang diasumsikan rawan buta huruf, maka buta aksara kembali muncul.

Tahun 1966-1970

Dikembangkan PBH fungsional. Pemberantasan buta huruf saat itu dibagi dalam tiga tahapan yaitu PBH permulaan, PBH lanjutan I dan PBH lanjutan II. Dalam PBH permulaan sebagai bahan belajarnya digunakan buku kecil (36 hal) "Petani Belajar Membaca" yang diselesaikan sekitar 20-30 hari.

Tahun 1970-an mulai dirintis program kejar Paket A yaitu program pemberantasan buta huruf dengan menggunakan bahan belajar buku Paket A yang terdiri Paket A1-A 100.

Sensus tahun 1971

Jumlah buta huruf menjadi sekitar 30 juta orang.

Pada tahun 1995

Dikembangkan Keaksaraan fungsional (KF) di 9 provinsi dengan memperbaiki sistem pelatihan, metodologi pembelajaran dan sistem penyelenggaraannya. Keaksaraan